

**PEMAHAMAN TERHADAP GELOMBANG DEMOKRATISASI DUNIA:  
ANALISA TERHADAP FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK SEBAGAI  
KEKUATAN UTAMA PEMICU PENERAPAN NILAI DEMOKRASI**

**DEWI SUCITAWATHI**

**ABSTRACT**

During a democratic wave, the organization of governments is altered – sometimes by peaceful reform, sometimes by dramatic overthrow – in ways that are widely held to be more democratic. During such a democratic wave, there is a great deal of discussion of the virtues of democracy, social movements often demand more democracy, and people in positions of authority proclaim their democratic intentions. During antidemocratic waves, governments are transformed in ways that are widely held to be undemocratic, social movements proclaim their intention to do away with democracy, and government figures proudly express their hostility to democracy.<sup>1</sup>

(Markoff 1996b: 1–2)

---

<sup>1</sup> Petikan dalam *abstract* diambil dari penjelasan John Markoff mengenai gelombang demokrasi I dalam buku Charles Tilly, *Democracy*, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab berjudul *Democracy in History* dengan sub bab *Waves of Democratization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hal.40.

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi sebagai nilai universal memiliki prinsip dasar yang membantu kita untuk memahami pentingnya penerapan demokrasi bagi masyarakat di suatu negara. Prinsip yang menekankan mengenai masalah hak-hak manusia sangat ditonjolkan dalam demokrasi. Hal mengenai kesetaraan martabat dari setiap individu, akses kontrol terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh para pembuat keputusan (birokrat), penghargaan terhadap pengaruh (masukan) yang diberikan oleh setiap manusia dalam mengawasi jalannya aktivitas pemerintahan sangat dipegang teguh dalam nilai demokrasi itu sendiri.<sup>2</sup> Bisa dikatakan demokrasi adalah suatu nilai yang paling menjanjikan untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Esensi dari demokrasi sendiri adalah suatu kondisi yang memberikan ruang bagi sekelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama untuk membuat keputusan-keputusan terhadap masalah tertentu. Dan tentunya pengambilan keputusan tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi setiap individu dalam kelompok untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini penerapan demokrasi menjadi suatu keharusan di beberapa negara, karena demokrasi dianggap sebagai metode terbaik yang dapat digunakan untuk pemerintah nasional dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya.<sup>3</sup>

Demokrasi identik dengan pembangunan. Karena berbicara demokrasi pasti tidak akan terlepas mengenai masalah *political and economic development*. Demokratisasi yang terjadi saat ini tidak

terlepas dari peranan negara-negara besar sebagai pionir utama. Sebut saja Amerika Serikat, negara ini telah bertekad akan mendorong usaha penyebaran nilai universal ini dengan cara apapun, bahkan hingga bantuan ekonomi pun akan diberikan asalkan negara penerima bantuan mau menerapkan demokrasi dalam sendi kehidupan bernegara. Sejak tahun 1960-an usaha Amerika Serikat telah dilakukan dalam menyebarkan ajaran mengenai demokrasi, dengan banyak memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan suatu negara.<sup>4</sup> Bahkan sering dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah aktor utama yang memberikan pengaruh substansial dalam hal petunjuk dan arahan untuk mempromosikan pembangunan dan demokrasi.<sup>5</sup>

Jika ditilik dari kajian historisnya, maka proses berkembangnya demokrasi di beberapa negara di dunia, menyebar bagai virus yang tidak dapat dihentikan dalam waktu yang relatif singkat. Artinya kecepatan penyebaran nilai demokrasi sangat tinggi, tetapi kemunduran eksistensinya juga berlangsung cukup lama. Pada akhir abad ke-20 sistem politik komunis mulai mengalami kemunduran pengaruh di beberapa negara. Fenomena tersebut ditandai dengan adanya resistensi dari masyarakat terhadap praktik-praktik pemerintahan yang otoritarian. Kebutuhan akan kondisi dunia yang lebih damai dan menjamin keadilan bagi setiap individu cenderung diarahkan kepada kepercayaan

---

<sup>2</sup> David Beetham, *Democracy: Key Principles, Institutions, and Problems*.

<sup>3</sup> Helena Catt, *Democracy in Practice* (London: Routledge, 1999), hal.4.

---

<sup>4</sup> Morton H. Halperin, Joseph T. Sigle, and Michael M. Weinstein, *The democracy advantage: how democracies promote prosperity and peace*, dapat dilihat dalam bab berjudul *Democracy as the Default Option* (New York: Routledge, 2005), hal.175.

<sup>5</sup> *Loc.cit.*

penerapan paham liberalisme, dengan garda terdepan berupa nilai demokrasi.

Dari sinilah awal pengaruh nilai universal ini terjadi. Kata kuncinya adalah perubahan. Masyarakat menginginkan sebuah wajah baru, dalam tatanan pemerintahan yang diharapkan mampu menjamin kesejahteraan tiap individu masyarakat. Dampak dari sistem pemerintahan yang otoritarian adalah tingkat pembangunan ekonomi negara tidak maksimal, sehingga menyebabkan terjadinya masalah pembangunan. Pembangunan bukan dalam arti *GDP improvement*, tetapi lebih pada *social improvement* dari masyarakat. Sehingga beberapa negara mulai membuka peluang bagi paham liberalisme dan nilai demokrasi untuk diuji coba di dalam negeri. Sistem ekonomi kapitalis yang diperkenalkan oleh Eropa dan Amerika sangat menjunjung tinggi kebebasan pasar dari campur tangan pemerintah.

Keterlibatan pemerintah hanya ada ketika terjadi ketidakstabilan dalam mekanisme pasar. Pada dasarnya ketika sebuah negara sudah mulai membuka pintu untuk paham liberal ke dalam sistem ekonomi, maka secara tidak langsung telah menciptakan interdependensi diantara negara-negara, dan memunculkan beraneka ragam organisasi internasional yang sangat vokal terhadap penerapan liberalisme dalam ekonomi, dan demokrasi dalam konstelasi kehidupan bernegara.<sup>6</sup> Penerapan nilai

---

<sup>6</sup> James Hollifield and Calvin Jillson, Editors, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions*, penjelasan dapat dilihat dalam bab berjudul *The Democratic Transformations: Lessons and Prospects* (New York: Routledge, 2000), hal. 3.

\*Gelombang demokratisasi pertama terjadi karena adanya dampak dari terjadinya revolusi di Amerika (1776) dan Perancis

demokrasi sebagai suatu pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi cerita yang unik untuk kita lihat lebih jauh mengenai awal perkembangannya. Maka penulis dalam karya tulis ini ingin menjelaskan:

1. "Prekondisi apa yang memunculkan gelombang demokratisasi I, II, III serta penyebab kemunduran ketiga gelombang tersebut?"
2. "Apa perbedaan antara gelombang demokratisasi III dengan gelombang demokratisasi I, dan II?"

## PEMBAHASAN

Pengenalan aktivitas ekonomi yang dominan digerakkan oleh pasar telah terjadi sejak kemunculan revolusi di Amerika dan Perancis, dan puncaknya adalah kehadiran Revolusi Industri di Inggris yang berpengaruh begitu besar di seluruh penjuru dunia. Ketika berbicara mengenai awal mula perkembangan demokrasi hingga diadopsi oleh beberapa negara sebagai suatu hal yang mutlak harus dimiliki, tentunya tidak terlepas pemahaman kita terhadap aktivitas proses. Demokratisasi telah melalui beberapa gelombang perkembangannya di dunia. Gelombang pertama demokratisasi terjadi pada akhir abad ke-19, dimana didorong ketika terjadi Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, dan seperti disebutkan sebelumnya Revolusi Industri yang paling memberikan dampak yang kuat dalam aktivitas ekonomi dunia, dan yang cenderung menciptakan pola hubungan kerja yang tidak seimbang.\*

Demokratisasi sebagai suatu proses sebenarnya diartikan sebagai revolusi dalam aspek politik dan ekonomi. Dikatakan dalam aspek ekonomi, karena ketiga revolusi diatas memberikan perubahan dalam kondisi kerja

---

(1789), serta puncaknya adalah Revolusi Industri di Inggris.

kaum buruh. Pengurangan aktivitas perbudakan, sistem ekonomi yang didasarkan atas eksploitasi dan pembelengguan kebebasan manusia dihapuskan. Ketika Revolusi Industri membawa penemuan-penemuan baru yang menciptakan lapangan kerja, aktivitas ekonomi tidak lagi didasarkan atas sektor pertanian, tetapi menjadi aktivitas industri. Sehingga mulai dikenal pembagian kerja dalam aktivitas produksi, kemiskinan dan kelaparan meningkat.<sup>7</sup> Huntington mengatakan bahwa gelombang demokratisasi pertama ditandai dengan adanya keterkaitan erat antara sejarah hubungan pembangunan ekonomi dan politik.<sup>8</sup>

Pembangunan ekonomi yang dimaksud adalah munculnya modernisasi, pembagian kerja bagi kaum buruh, pemisahan sektor publik dan sektor swasta, campur tangan gereja terhadap aktivitas negara diminimalisir.<sup>9</sup> Hal tersebut memudahkan peluang demokrasi untuk tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat. Kenyataannya kemunculan aktivitas sektor industri menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi diantara para pemilik modal (borjuis) dengan kaum buruh (proletar). Hal ini yang disebut Francis Fukuyama sebagai indikasi adanya kondisi individualisme yang radikal dan sebuah bentuk baru alienasi kelas yang tertindas.<sup>10</sup> Jadi prekondisi yang memunculkan gelombang demokratisasi I adalah prekondisi ekonomi.

Terjadinya kemajuan ekonomi yang sangat pesat di Eropa dan Amerika memberikan kontribusi yang begitu besar bagi penerapan liberalisme dan demokrasi.

Kemajuan ekonomi dan teknologi telah membawa perubahan dari masyarakat tradisional ke modern. Tetapi seiring berjalannya pembangunan, tatanan sosial masyarakat menunjukkan disparitas yang begitu besar, utamanya antara kelas pemilik modal (kapitalis) dengan kelas pekerja (buruh). Sehingga muncul pemikiran dari Karl Marx yang memusatkan perhatiannya pada perubahan yang terjadi pada aktivitas ekonomi yang melibatkan manusia. Marx mengatakan bahwa modernisasi ekonomi yang sedang berjalan menciptakan benturan antar kelas, pembangkangan kaum pekerja terhadap para pemilik modal, kemiskinan yang semakin meningkat, konflik, ketiadaan kelompok masyarakat yang dibagi-bagi atas kelas tertentu, dan akan memunculkan masyarakat komunis.<sup>11</sup>

Dengan kata lain nasionalisme yang akan menjadi bentuk politik yang terkuat dalam merespon ketimpangan yang begitu besar dalam aktivitas sistem ekonomi kapitalis. Hal ini menjadi acuan bagaimana gelombang demokratisasi I mengalami masa surutnya ketika beberapa negara mulai memunculkan semangat nasionalisme yang mengantarkan pada Perang Dunia I. Kondisi krisis ekonomi juga menjadi pemicu utama negara-negara bersikap proteksionis dalam kebijakan politik, bahkan cenderung menuju pada kepemimpinan yang militeristik totaliter.

Gelombang demokratisasi II dimulai setelah Perang Dunia II, dimana saat itu peta politik dunia tidak lagi didasarkan pada sistem multipolar yang didominasi negara-negara Eropa besar untuk berkompetisi memperluas wilayah koloni di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.<sup>12</sup> Tetapi polanya hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 5. Dalam sub bab *Modernization and the First End of History*.

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

<sup>9</sup> *Loc.cit.*

<sup>10</sup> *Loc.cit.*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 6. Dalam sub bab *Nationalist and the First Failure of Modernization*.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 8. Dalam sub bab *The Second Wave: Decolonization and the Second Failure of Modernization*.

tersentralisir pada dua kekuatan utama, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang didasarkan pada perimbangan kekuatan nuklir.<sup>13</sup> Demokrasi memperoleh keuntungannya akibat dari masa pencerahan terutama di Eropa, ketika gelombang pertama terjadi. Sedangkan pada gelombang kedua dan ketiga diuntungkan karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat yang lebih baik. Jadi dekolonisasi menjadi sarana bagi nilai demokrasi untuk kembali memberikan pengaruh di beberapa wilayah jajahan. Kondisi kepercayaan akan penjaminan kesejahteraan tidak muncul begitu cepat di negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Hal ini sangat kontras dengan kenyataan yang terjadi, dimana hubungan yang terbentuk antara negara-negara demokrasi baru bersifat *dependensia* terhadap negara dominan.<sup>14</sup> Kondisi ketergantungan membuka ruang yang lebih besar bagi bekerjanya instrumen pengaruh suatu negara kepada negara lain. Instrumen tersebut berupa lembaga moneter internasional seperti World Bank dan IMF. Kedua lembaga tersebut memberikan keyakinan dan legitimasi yang kuat bagi negara-negara penghutang untuk menerapkan persyaratan mendapatkan pinjaman. Dua diantaranya adalah masalah liberalisasi aktivitas ekonomi (pasar dominan), serta demokrasi. Harga mutlak yang harus dimiliki sebuah negara jika ingin mendapatkan bantuan hutang dari lembaga-lembaga tersebut.

Memang demokrasi harus diterapkan di beberapa negara, tetapi kesulitan akan muncul ketika negara yang menerapkan demokrasi itu sendiri tidak memiliki

supremasi hukum yang kuat. Hal tersebut tidak jarang memunculkan praktik-praktik korupsi para birokrat yang berkuasa. Sehingga menyebabkan pengaruh demokrasi di dalam kehidupan masyarakat yang mendiami sebuah negara lemah hukum mengakibatkan hancurnya sendi-sendi kesejahteraan masyarakat. Rendahnya pembangunan ekonomi, kelas menengah yang semakin lemah, tingkat buta huruf yang begitu besar, kurangnya simpati akan keberagaman bermasyarakat, dan ketiadaan tanggung jawab aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pasar untuk tujuan sosial merupakan dampak dari ketidakmampuan menerapkan demokrasi.<sup>15</sup> Memang prekondisi pada gelombang kedua ini tetap mengenai masalah ekonomi. Kondisi ekonomi yang memberi jalan kembali bagi demokrasi untuk memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tetapi kondisi *dependensia* menyebabkan pudarnya kepercayaan akan demokrasi itu sendiri. Akibatnya muncul rezim-rezim militer yang kuat dan cenderung otoriter.

Proses demokratisasi yang bisa dikatakan berhasil bertahan hingga saat ini adalah gelombang III dengan penekanan mengenai *political development* sebagai kata kuncinya. Untuk memahami perkembangan demokrasi pada gelombang ketiga, tentunya kita harus mengetahui kondisi seperti apa yang menjadi tolak ukur bangkitnya nilai demokrasi sebagai suatu kebutuhan utama masyarakat dan pemerintah di beberapa belahan dunia. Tolak ukur pertama kita bisa lihat mulai muncul rezim-rezim yang lebih bersifat terbuka dibandingkan dulu, yang dominan dimiliki oleh militer (Eropa ke selatan).<sup>16</sup> Kedua, transisi menuju proses

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

<sup>14</sup> *Loc.cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 10. Dalam sub bab *The Third Wave: The Integrating Effects of an International Political Economy*.

demokratisasi dilihat dengan mulai ditinggalkannya sistem kepartaian tunggal yang otoritarian (Asia).<sup>17</sup>

Dan yang ketiga, transisi mulai meninggalkan rezim-rezim yang dikuasai oleh kelompok komunis oligarki di beberapa negara (Eropa Timur dan eks-Uni Soviet). Selain itu kondisi yang mencolok dari proses demokratisasi gelombang ketiga adalah mulai dihilangkannya bentuk-bentuk kepemimpinan yang cenderung didominasi oleh kekuasaan kelompok tertentu. Dengan kata lain, perubahan sistem pemerintahan yang otoritarian digantikan oleh sistem pemerintah perwakilan yang demokratis (Hobbesian principle to Lockean principle).<sup>18</sup> Secara singkat dapat kita analisa bahwa prekondisi yang menyebabkan demokrasi mulai eksis kembali sebagai nilai universal yang paling cocok bagi kehidupan bernegara adalah prekondisi ekonomi.

Keberhasilan beberapa negara dalam bidang perekonomian tidak begitu saja terjadi tanpa dukungan sistem politik yang stabil, dan kestabilan itu tentunya harus dibarengi oleh penerapan prinsip-prinsip demokrasi bernegara. Negara yang demokratis serta didukung oleh masyarakat yang juga demokratis, akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat tersebut. Negara yang lemah secara ekonomi akan sulit menerima nilai-nilai demokrasi, karena masyarakat yang terlibat didalamnya belum memiliki kesiapan untuk menerapkan esensi utama dari arti demokrasi itu sendiri. Hingga saat ini nilai demokrasi masih mampu bertahan sebagai nilai paling unggul untuk

menjalankan kegiatan pemerintahan dari suatu negara.

Perbedaan paling utama antara gelombang demokratisasi I dibanding dengan I dan II adalah terletak pada dua hal, yaitu pertama pada gelombang I proses demokratisasi di beberapa negara di dunia berlangsung sangat cepat.<sup>19</sup> Kedua, adanya faktor-faktor internasional (eksternal) yang mempengaruhi perubahan beberapa rezim.<sup>20</sup> Yang dimaksud dengan faktor internasional tersebut tidak lain adalah globalisasi yang menyebabkan terjadinya aktivitas perdagangan internasional, moneter internasional, dan migrasi sebagai pemicu semakin kuatnya posisi demokrasi dalam kehidupan masyarakat di berbagai negara.<sup>21</sup>

Mengkonsolidasikan demokrasi, dengan cara menciptakan aturan hukum yang bisa memberikan keadilan, serta merefleksikan kepentingan umum masyarakat sipil utamanya. Selain demokrasi mengajarkan bahwa sangat baik jika ada keteraturan dalam mengorganisir aktivitas produksi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas, serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai demokrasi bagi kesejahteraan setiap individu manusia. Demokrasi membutuhkan kondisi negara yang bebas dari praktik-praktik korupsi, pejabat publik yang harus benar-benar bisa bekerja untuk kepentingan umum, pembinaan terhadap sistem kepartaian yang harus mampu menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta adanya desentralisasi kekuatan-kekuatan politik yang seimbang tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan atas dasar kekuasaan yang dimiliki.<sup>22</sup>

Gelombang demokratisasi ketiga adalah gelombang yang hingga saat ini

---

<sup>17</sup> *Loc.cit.*

<sup>18</sup> *Loc.cit.* Konsepsi perubahan menuju demokrasi, dengan melihat sistem pemerintahan yang otoritarian digantikan menjadi sistem perwakilan pemerintahan yang lebih demokratis.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>20</sup> *Loc.cit.*

<sup>21</sup> *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Loc.cit.*

masih berlangsung. Perkembangan demokrasi politik di beberapa negara sudah mulai mengalami perubahan dalam arti yang lebih baik. Mekanisme ekonomi yang mengutamakan aktivitas pasar sudah banyak diterapkan. Kemampuan masyarakat sipil (civil society) untuk berusaha menciptakan bentuk pemerintahan yang sehat juga sudah semakin meningkat. Negara menerapkan demokrasi diakibatkan oleh perubahan yang terjadi dalam tatanan politik dan ekonomi. Dalam bidang politik, demokrasi telah mengubah hubungan kekuasaan.<sup>23</sup> Sedangkan dalam bidang ekonomi, demokrasi telah mengubah hubungan pertukaran.<sup>24</sup> Ketika sebuah negara telah mampu menerapkan demokrasi, maka ketika itu masyarakat yang berada di dalamnya mampu diberi jaminan keselamatan dan kesejahteraan oleh pemerintahnya. Proses menuju ke negara yang demokratis pun tidak berlangsung cepat. Semua membutuhkan waktu dan kesiapan dari setiap individu untuk mau memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jelas bisa dilihat dalam tabel mengenai proses perkembangan demokrasi.

Tabel 1. (Versi James Hollifield and Calvin Jillson)

	Gelombang Demokratisasi I (1820 – 1914)	Gelombang Demokratisasi II (1950 – 1960)	Gelombang Demokratisasi III (1970 – Sekarang)
Awal	Prekondisi Ekonomi	Prekondisi Ekonomi	Prekondisi Ekonomi
Akhir	Nasionalisme menyebabkan terjadinya Perang Dunia I	Dependensi dan rezim militer dominan	? (Masih Berlangsung)

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>24</sup> *Loc.cit.*

Tatu Vanhanen memberikan penjelasan mengenai demokratisasi yang terjadi di beberapa negara, dibagi atas tiga periode waktu, yaitu 1850 – 1899, 1900 – 1949, dan 1950 – 1979, sebagai berikut:<sup>25</sup>

BOX 2-2. Sites of Relatively Rapid Democratization, 1850–1979	
1850–1899	
Asia-Pacific:	None
Europe:	Austria, Belgium, Denmark, France, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Americas:	Argentina, Bolivia, Chile, Dominican Republic, Ecuador, Uruguay
Africa:	None
1900–1949	
Asia-Pacific:	Australia, Japan, New Zealand
Europe:	Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Americas:	Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Honduras, Mexico, Panama, Peru, United States, Uruguay
Africa:	Egypt
1950–1979	
Asia-Pacific:	India, Israel, Lebanon, South Korea, Thailand, Turkey
Europe:	Greece, Portugal, Spain
Americas:	Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Peru, Venezuela
Africa:	Egypt, Morocco, Zambia
<i>Source:</i> Vanhanen 1997: 251–271	

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan, didapatkan bahwa gelombang demokratisasi I, II, III yang terjadi di beberapa negara disebabkan oleh prekondisi-prekondisi ekonomi. Gelombang I dikarenakan adanya aktivitas ekonomi terbesar dalam sejarah, yaitu Revolusi Industri. Nilai-nilai demokrasi saat itu sudah dikenal, karena demokrasi melekat sebagai nilai dalam aktivitas ekonomi liberal yang berkembang saat itu. Sedangkan gelombang II, demokrasi mulai bangkit kembali dengan peran utama yang dijalankan oleh Amerika Serikat sebagai pimpinan utama. Amerika Serikat hingga gelombang demokratisasi III tetap menjadi motor penggerak penyebaran nilai demokrasi di seluruh dunia.

<sup>25</sup> Charles Tilly, *op.cit.*, hal. 42.

Kemunduran dalam perkembangan demokrasi hanya disebabkan oleh rezim yang berkuasa pada suatu negara, dan pada waktu tertentu. Nasionalisme, kondisi dependensia menyebabkan hilangnya kepercayaan negara dalam menerapkan demokrasi. Hal tersebut menyebabkan mudahnya rezim militer untuk mengontrol sepenuhnya kegiatan pemerintahan. Perlu diketahui demokrasi tidak bisa hidup di negara yang dikontrol oleh militer. Demokrasi berkaitan erat dengan kebebasan. Kebebasan bisa diartikan secara sosial, politik, dan ekonomi. Jadi prasyarat pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung hak azasi manusia, cenderung mampu diterima oleh masyarakat, dan terutama bagi kelanggengan hidup nilai universal ini.

Negara yang demokratis harus mampu memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk mengekspresikan pikiran mereka dalam suatu wadah sosial yang disebut pemilihan umum yang jujur dan adil. Aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh pasar harus dibarengi oleh penegakan hukum yang kuat, dan kebebasan dalam memperoleh informasi. Serta mendorong tumbuhnya masyarakat sipil yang sadar akan pentingnya penerapan demokrasi bagi seluruh sendi kehidupan yang dijalani. Liberalisme dan demokrasi menjadi suatu paket bagi negara-negara berkembang untuk mengubah sistem pemerintahan yang cenderung korup, oligarki kekuasaan, supremasi hukum lemah menjadi sistem pemerintahan yang bersih.

Jadi masa transisi menuju demokrasi membutuhkan banyak hal yang harus dipahami. Negara yang telah maju secara ekonomi, cenderung dengan mudah menerima dan menerapkan demokrasi di dalam negerinya. Tetapi, negara yang lemah

secara ekonomi sangat rentan terjadi kekacauan di dalam negeri. Demokrasi tidak hanya butuh prasyarat ekonomi, tetapi juga butuh prasyarat politik dalam kehidupan bernegara. Di satu sisi memang faktor ekonomi sangat mempengaruhi, tetapi jika ditilik lebih jauh banyak negara yang telah maju, masih tetap tidak mampu menerapkan nilai demokrasi dengan baik. Hal ini yang menjadi tantangan bagi kita untuk melihat secara kritis fenomena demokrasi sebagai suatu nilai universal bagi negara-negara untuk menjamin dan berusaha mendorong masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

#### **REFERENSI BUKU:**

- Beetham , David, *Democracy: Key Principles, Institutions and Problems*.
- Catt, Helena, *Democracy in Practice* (London: Routledge, 1999).
- Halperin, Morton H, Joseph T. Siegle, Michael M. Weinstein, *The democracy advantage: how democracies promote prosperity and peace* (New York: Routledge, 2005).
- Hollifield, James Frank, Calvin Jillson, Editors, *Pathways to Democracy: The Political Economy of Democratic Transitions* (New York: Routledge, 2000).
- Tilly, Charles, *Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

---

Penulis adalah:

1. Dosen FISIP Undiknas Denpasar